

RENCANA KERJA
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKIR RENJA) ini merupakan wujud akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik di wilayah Kecamatan Sooko.

Dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari kreteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kesempurnaan dokumen dan pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKIR RENJA) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan pada kita semua dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2022

CAMAT SOOKO



MASLUCHMAN, SH, MSI
Pembina Tk.I
NIP. 19691119 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal
Daftar Isi	
BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 4
1.2	Landasan Hukum 5
1.3	Maksud dan Tujuan 7
1.4	Sistematika Penulisan 7
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kec. Sooko 9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 20
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 22
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD 23
2.5	Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 36
BAB III	Tujuan dan Sasaran
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37
3.3	Program dan Kegiatan 37
BAB IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 49
BAB V	Penutup 66

BAB I
PENDAHULUAN

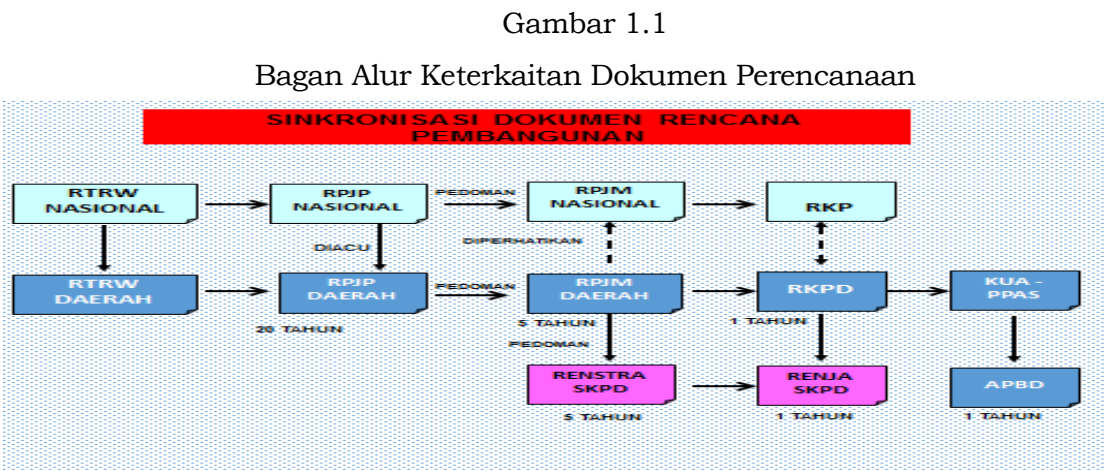
1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Sooko merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Sooko yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Sooko adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sooko Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Sooko yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Sooko.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia M Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 01 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Sooko Tahun 2023, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto . Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD GOVERNMENT .

Adapun *tujuannya* adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2023 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Sooko ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
	3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V		PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Sooko pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Realisasi belanja pada Kecamatan Sooko Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			%	Rp.	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	99,92%	4.996.150	3.850
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	99,98%	9.997.904	2.096
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.345.833.103	60,24%	2.015.461.800	1.330.371.303
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.808.960	100%	26.808.960	0
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12,500,000.00	98,54%	12.317.500	182.500
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	99,95%	7.496.350	3.650
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.500.000	97,19%	214.304.938	6.195.062
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	96,45%	28.935.100	1.064.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	92,00%	4.600.242	399.758
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	99,97%	9.996.830	3.170
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.800.000	100%	21.800.000	0
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.350.000	56,72%	26.627.433	18.722.567
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,000,000	77,78%	21.000.000	6.000.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	530.000.000	91,40%	484.410.900	45.589.100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	99,50%	24.873.937	126.063
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional lapangan	1.500.000	93,33%	1.400.000	100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.191.040	94,96%	17.274.400	916.640
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	98,00%	7.350.000	150.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000	99,99%	2.488.762	11.238
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	32.500.000	97,95%	32.285.456	214.544
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.017.000	96,04%	36.660.000	357.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	131.500.000	99,33%	130.620.552	879.448
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	97,16%	34.006.934	993.066
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	99,998%	9.998.328	1.672
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.000.000	99,29%	7.943.500	56.500
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000	99,81%	10,979,215	20.785
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	99,89%	4.994.454	5.546
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	99,34%	9.933.764	66.236
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.000.000	98,23%	11.787.000	213.000
	TOTAL	4.644.000.103	64,48%	3,007,260,085.00	1,075,476,453.60

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapaian Kinerja secara umum terlaksana dengan baik 74%, Pagu Anggaran sebesar Rp. **4.644.000.103,-** teraalisasi sebesar **Rp. 3.231.350.409,-** sisa anggaran **Rp. 1.412.649.694,-**

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*** karena adanya Jabatan Struktural yang kosong sebanyak 4 orang dan ASN yang pensiun pada saat itu sebanyak 4 orang.

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

OPD Kecamatan Sooko

Lembar ...

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluar Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	79	80	80	100	81		100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100	14 dokumen		100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen		100

		sesuai ketentuan yang berlaku								
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen		100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	98 laporan	98 laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	38 laporan	38 laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	60 laporan	60 laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas serta perleng kapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 Stel	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 Stel	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	90%	90%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%

		umum perkantoran								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	90%	90 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	90%	90 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%						
7.01.02.2.04		Persentase rekomendasi fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%						
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Prosentase Pelayanan Perijinan dan	100 %	100 %						

	Camat	Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan								
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %						
		Prosentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %						
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi ,fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	100%	100%						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa		100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa		100

		Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa		100
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa		100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa		100

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	
			TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut :

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sooko
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM			80	81	82	83	81,09	-	84	85	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			70	70.5	71	71,5	70	70.5	71	71,5	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79	80	81	82	79,36	-	81	82	
4	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			100	100	100	100	100	-	100	100	
5	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat			100	100	100	100	100	-	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Sooko diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Sooko

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Sooko bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Sooko yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Sooko;

- Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas ;
- 2) Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
- 3) Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Sooko namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
 2. Tingginya peluang pasar.
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
 2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
 3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 4. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Sooko yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Sooko untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sooko Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sooko Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Sooko

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	4.052.170.479	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	2.502.381.412	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	14 doku-men	5.350.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000	
								Jumlah Dokumen Renja			
								Jumlah Dokumen Renja Perubahan			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

						Penyusunan RKA		Jumlah Dokumen RKA			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
						Penyusunan P-RKA		Jumlah Dokumen P-RKA			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
						Penyusunan DPA		Jumlah Dokumen DPA			
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
						Penyusunan P-DPA		Jumlah Dokumen P-DPA			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	14 doku-men	10.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	7.500.000	
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan		Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan	4 laporan	1.000.000	

						Penyusunan Dokumen LKjIP		Jumlah Laporan LKjIP	1 laporan	1.000.000	
						Penyusunan Dokumen LRA		Jumlah Laporan LRA	12 laporan	1.000.000	
						Penyusunan Dokumen CALK		Jumlah Laporan CALK	1 laporan	1.000.000	
						Penyusunan Dokumen SAKIP		Jumlah Laporan SAKIP	1 laporan	1.000.000	
						Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan	1 laporan	1.000.000	
						Sinergitas Kecamatan		Jumlah Laporan	1 laporan	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	3.729.859.567	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	95%	2.260.531.412	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 dokumen	3.701.173.980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.260.531.412	
						Penyediaan Gaji ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	1.347.716.000	
						Penyediaan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	912.815.412	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah laporan keuangan bulanan	17 lapo-ran	28.685.587	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	

						Dokumen Prognosis		Jumlah Dokumen	0	0	
						Dokumen Belanja Fungsional		Jumlah Dokumen	0	0	
						Dokumen Rekonsiliasi Aset		Jumlah Dokumen	0	0	
						Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi		Jumlah Dokumen	0	0	
						Berita Acara Cash Opname		Jumlah Dokumen	0	0	
						Berita Acara Opname Persediaan		Jumlah Dokumen	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	59,30	13.375.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	75%	15.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stel	13.375.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	0	0	
						Seragam Kedy		Jumlah Pengadaan Kain Seragam	0	0	
						Korpri dan Celana		Jumlah Pengadaan Kain Seragam	0	0	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	15.000.000	
						Bimtek Peningkatan ASN		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	15.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%	158.520.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	80.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	8.025.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	7.500.000	
						Lampu, Kabel, Komponen Listrik Lainnya		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	75.345.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	20.000.000	
						Laptop, Printer, AC, Komputer, CCTV, Mesin Fotocopy dll		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	20.000.000	
	Penyediaan bahan logistik Kantor		Jumlah logistik Kantor yang tercukupi		32.100.000	Penyediaan bahan logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30.000.000	
						Makanan dan Minuman Rapat		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jmlh jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	5.350.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jmlh jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	5.000.000	
						Fotocopy, Cetak lembar SPPD, Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas, Cetak Kop Dinas		Jmlh jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	5.000.000	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah waktu pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	12 bulan	0	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah waktu pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	12 bulan	0	

	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	10.700.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	10.000.000	
						ATK		Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	27.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.000.000	
						SPPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.000.000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	1 paket	10.000.000	
						Pengadaan Mebel		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	0	0	
						Meja Rapat, kursi rapat, almari, kursi tamu, dll		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	87%	77.521.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	72.350.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	48.631.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.350.000	
						Listrik kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	29.496.500	
						Air Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	5.953.500	

						Kebutuhan Telepon dan Internet Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	9.900.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 orang	28.890.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000	
						Tenaga administrasi kantor (2 orang)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%	56.844.412	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	59.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 kendaraan	26.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	26.500.000	
						Pajak		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	1.525.000	
						BBM		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	21.975.000	

						Service Kendaraan Dinas		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	3.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	2 kendaraan	1.605.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	2 kendaraan	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	20.464.412	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	25.000.000	
						Pemeliharaan Gedung		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	18.750.000	
						Pemeliharaan Pendopo		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	6.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	8.025.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	7.500.000	
						Service Peralatan kantor, printer, laptop, AC, dll		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	7.500.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	37.450.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	25.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	715 pelayanan	37.450.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 pelayanan	25.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	1.070 pelayanan	2.675.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	500 pelayanan	25.000.000	
						Sosialisasi Bidang Pelayanan, Monev, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			1 Laporan Hasil Sosialisasi Bidang	10.000.000	

									Pelayanan, 5 Laporan Hasil Monev, 12 Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Bidang Pelayanan, 12 Laporan Bidang Pelayanan		
						SKM (Mendukung program bupati pada misi 3)			1 Laporan	5.500.000	
						Sosialisasi Bidang Pelayanan			1 Laporan	2.000.000	
						Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			12 Laporan	5.000.000	
						Evaluasi Pelayanan			12 Laporan	2.500.000	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	1.070 pelayanan	34.775.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0	0	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	282.428.190	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	196.517.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	16 fasili- tasi	282.428.190	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 dokumen	196.517.000	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 fasili-tasi	35.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	17.500.000	
						Asistensi Penyusunan LPJ		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Asistensi Penatausahaan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Asistensi Perubahan APBDes		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Asistensi Penyusunan APBDes		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
						Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 fasilitasi	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	17.000.000	

						Musrenbang		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	8.000.000	
						Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000	
						Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000	
						Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000	
						Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 fasilitasi	67.428.190	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	45.000.000	
						Honorarium Tim Forkopimca		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	10.200.000	
						Apel Linmas		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	9.000.000	
						Pemantauan dan Pengamanan Wilayah		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	9.000.000	

						Tanggap Bencana		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	7.800.000	
						Penertiban dan Penegakan Perda		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	9.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 asilitasi	150.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	5 dokumen	117.017.000	
						Koordinasi dan Konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat	1 Dokumen	6.000.000	
						Hibah Sapi		Jumlah dokumen	1 Dokumen	35.000.000	
						Pemberdayaan Masyarakat (Salah satunya mendukung KLA ; mendukung program prioritas Bupati (ODF))		Jumlah dokumen	1 Dokumen	67.017.000	
						Pencegahan dan Penanganan Wabah		Jumlah dokumen	1 Dokumen	3.000.000	
						Fasilitas Bantuan Sosial		Jumlah dokumen	1 Dokumen	6.000.000	
Total					4.372.049.169					2.723.898.412	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di kecamatan Sooko melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Sooko secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sooko	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 ekor hewan qurban idul adha	Hibah Sapi untuk 1 desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sooko ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
- 2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sooko Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 6. Penyediaan Bahan / Material 7. Pengadaan Barang milik Daerah 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Sooko	80	2.502.381.412	APBD Kab.		79,56	3.508.075.745
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Sooko	80%	15.000.000	APBD Kab.		100%	17.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Kec. Sooko	2 dokumen	7.500.000	APBD Kab.		7 doku-men	8.500.000
		Jumlah Dokumen Renja	Kec. Sooko			APBD Kab.			
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	Kec. Sooko			APBD Kab.			

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Penyusunan RKA	Jumlah Dokumen RKA	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Penyusunan P-RKA	Jumlah Dokumen P-RKA	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sooko			APBD Kab.			
	Penyusunan P-DPA	Jumlah Dokumen P-DPA	Kec. Sooko			APBD Kab.			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Kec. Sooko	20 Laporan	7.500.000	APBD Kab.		6 doku-men	8.500.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan	Kec. Sooko	4 laporan	1.000.000	APBD Kab.			
	Penyusunan Dokumen LKjIP	Jumlah Laporan LKjIP	Kec. Sooko	1 laporan	1.000.000	APBD Kab.			

	Penyusunan Dokumen LRA	Jumlah Laporan LRA	Kec. Sooko	12 laporan	1.000.000	APBD Kab.			
	Penyusunan Dokumen CALK	Jumlah Laporan CALK	Kec. Sooko	1 laporan	1.000.000	APBD Kab.			
	Penyusunan Dokumen SAKIP	Jumlah Laporan SAKIP	Kec. Sooko	1 laporan	1.000.000	APBD Kab.			
	Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	Kec. Sooko	1 laporan	1.000.000	APBD Kab.			
	Sinergitas Kecamatan	Jumlah Laporan	Kec. Sooko	1 laporan	1.500.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Sooko	92%	2.260.531.412	APBD Kab.		100%	3.179.658.665
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	53 dokumen	2.260.531.412	APBD Kab.		53 dokumen	3.152.849.665
	Penyediaan Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	21 orang/bulan	1.347.716.000	APBD Kab.			
	Penyediaan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	21 orang/bulan	912.815.412	APBD Kab.			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.		5 lapo-ran	26.809.000
	Dokumen Prognosis	Jumlah Dokumen	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Dokumen Belanja Fungsional	Jumlah Dokumen	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Dokumen Rekonsiliasi Aset	Jumlah Dokumen	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi	Jumlah Dokumen	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Berita Acara Cash Opname	Jumlah Dokumen	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			

	Berita Acara Opname Persediaan	Jumlah Dokumen	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Sooko	75%	15.000.000	APBD Kab.		33 indeks	13.000.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.		30 stel	13.000.000
	Seragam Kunci	Jumlah Pengadaan Kain Seragam	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Korpri dan Celana	Jumlah Pengadaan Kain Seragam	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Sooko	21 orang	15.000.000	APBD Kab.		0	0
	Bimtek Peningkatan ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Sooko	21 orang	15.000.000	APBD Kab.		0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Sooko	92%	80.500.000	APBD Kab.		100%	161.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Kec. Sooko	1 paket	7.500.000	APBD Kab.		1 paket	8.500.000
	Lampu, Kabel, Komponen Listrik Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Kec. Sooko	1 paket	7.500.000	APBD Kab.		1 paket	8.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Sooko	1 paket	20.000.000	APBD Kab.		1 paket	77.500.000
	Laptop, Printer, AC, Komputer, CCTV, Mesin Fotocopy dll	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sooko	1 paket	20.000.000	APBD Kab.		1 paket	77.500.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah logistik Kantor yang tercukupi	Kec. Sooko	1 paket	30.000.000	APBD Kab.		1 paket	32.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Sooko	1 paket	30.000.000	APBD Kab.		1 paket	32.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jmlh jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Kec. Sooko	1 paket	5.000.000	APBD Kab.		1 paket	5.500.000

	Fotocopy, Cetak lembar SPPD, Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas, Cetak Kop Dinas	Jmlh jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Kec. Sooko	2 paket	5.000.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Kec. Sooko	1 Paket	10.000.000	APBD Kab.		1 Paket	11.000.000
	ATK	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Kec. Sooko	1 Paket	10.000.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	12 bulan	8.000.000	APBD Kab.		12 bulan	27.000.000
	SPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	12 laporan	8.000.000	APBD Kab.			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
	Meja Rapat, kursi rapat, almari, kursi tamu, dll	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Kec. Sooko	100%	72.350.000	APBD Kab.		100%	79.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sooko	12 bulan	45.350.000	APBD Kab.		12 bulan	50.000.000
	Listrik kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sooko	12 Laporan	29.496.500	APBD Kab.			
	Air Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sooko	12 Laporan	5.953.500	APBD Kab.			

	Kebutuhan Telepon dan Internet Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sooko	12 Laporan	9.900.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sooko	12 Laporan	27.000.000	APBD Kab.		2 orang	29.000.000
	Tenaga administrasi kantor (2 orang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sooko	12 Laporan	27.000.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Sooko	82%	59.000.000	APBD Kab.		100%	57.917.080
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Kec. Sooko	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	26.500.000	APBD Kab.		2 kendaraan	27.000.000
	Pajak	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Kec. Sooko	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	1.525.000	APBD Kab.		2 kendaraan	1.800.000
	BBM	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Kec. Sooko	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	21.975.000	APBD Kab.			
	Service Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Kec. Sooko	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	3.000.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Kec. Sooko	2 kendaraan	-	APBD Kab.			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Sooko	2 unit	25.000.000	APBD Kab.		2 unit	20.617.080
	Pemeliharaan Gedung	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Sooko	2 unit	18.750.000	APBD Kab.			
	Pemeliharaan Pendopo	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Sooko	2 unit	6.250.000	APBD Kab.			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Service Peralatan kantor, printer, laptop, AC, dll	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sooko Kec. Sooko	10 unit 10 unit	7.500.000 7.500.000	APBD Kab. APBD Kab.		1 paket	8.500.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	82%	25.000.000	APBD Kab.		82%	50.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Sooko	500 pelayanan	25.000.000	APBD Kab.		750 pelayanan	50.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	0	0	APBD Kab.		750 pelayanan	20.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	500 pelayanan	25.000.000	APBD Kab.		750 pelayanan	30.000.000

	Sosialisasi Bidang Pelayanan, Monev, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	1 Laporan Hasil Sosialisasi Bidang Pelayanan, 5 Laporan Hasil Monev, 12 Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Bidang Pelayanan, 12 Laporan Bidang Pelayanan	10.000.000	APBD Kab.			
	SKM (Mendukung program bupati pada misi 3)	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	1 Laporan	5.500.000	APBD Kab.			
	Sosialisasi Bidang Pelayanan	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	1 Laporan	2.000.000	APBD Kab.			
	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	12 Laporan	5.000.000	APBD Kab.			
	Evaluasi Pelayanan	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	12 Laporan	2.500.000	APBD Kab.			
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Sooko	82%	196.517.000	APBD Kab.		82%	380.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kec. Sooko	23 dokumen	196.517.000	APBD Kab.		16 fasili-tasi	380.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	8 dokumen	17.500.000	APBD Kab.		3 fasili-tasi	60.000.000
	Asistensi Penyusunan LPJ	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
	Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
	Asistensi Penatausahaan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
	Asistensi Perubahan APBDes	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			

	Asistensi Penyusunan APBDes	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500	APBD Kab.			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	5 dokumen	17.000.000	APBD Kab.		4 fasilitasi	75.000.000
	Musrenbang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	1 Dokumen	8.000.000	APBD Kab.			
	Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	1 Dokumen	2.250.000	APBD Kab.			
	Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	1 Dokumen	2.250.000	APBD Kab.			
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	1 Dokumen	2.250.000	APBD Kab.			
	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	1 Dokumen	2.250.000	APBD Kab.			

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	5 dokumen	45.000.000	APBD Kab.		3 fasilitas	80.000.000
	Honorarium Tim Forkopimca	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	1 Dokumen	10.200.000	APBD Kab.			
	Apel Linmas	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	1 Dokumen	9.000.000	APBD Kab.			
	Pemantauan dan Pengamanan Wilayah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	1 Dokumen	9.000.000	APBD Kab.			
	Tanggap Bencana	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	1 Dokumen	7.800.000	APBD Kab.			
	Penertiban dan Penegakan Perda	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	1 Dokumen	9.000.000	APBD Kab.			
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	15 Fasilitas	117.017.000	APBD Kab.		3 Fasilitas	165.000.000
	Koordinasi dan Konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Kec. Sooko	1 Dokumen	6.000.000	APBD Kab.			
	Hibah Sapi	Jumlah dokumen	Kec. Sooko	1 Dokumen	35.000.000	APBD Kab.			
	Pemberdayaan Masyarakat (Salah satunya mendukung KLA ; mendukung program prioritas Bupati (ODF))	Jumlah dokumen	Kec. Sooko	1 Dokumen	67.017.000	APBD Kab.			

	Pencegahan dan Penanganan Wabah	Jumlah dokumen	Kec. Sooko	1 Dokumen	3.000.000	APBD Kab.			
	Fasilitas Bantuan Sosial	Jumlah dokumen	Kec. Sooko	1 Dokumen	6.000.000	APBD Kab.			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sooko Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Sooko Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 **KECAMATAN SOOKO**

N O	KODE REKENI NG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2023	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	SUMB ER DANA	KET.
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARG ET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kec. Sooko	Nilai IKM	82					2.723.898.412	3.938.075.745		
						Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71								
	7.01.01					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81					2.502.381.412	3.508.075.745		
	7.01.01.2.01							Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%			15.000.000	17.000.000		
	7.01.01.2.01.01									Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	2 doku-men	7.500.000	8.500.000		
										Jumlah Dokumen Renja					
										Jumlah Dokumen Renja Perubahan					

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
		Penyusunan RKA						Jumlah Dokumen RKA						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
		Penyusunan P-RKA						Jumlah Dokumen P-RKA						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
		Penyusunan DPA						Jumlah Dokumen DPA						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
		Penyusunan P-DPA						Jumlah Dokumen P-DPA						

	7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	20 laporan	7.500.000	8.500.000		
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan								Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan	4 laporan	1.000.000			
		Penyusunan Dokumen LKjIP								Jumlah Laporan LKjIP	1 laporan	1.000.000			
		Penyusunan Dokumen LRA								Jumlah Laporan LRA	12 laporan	1.000.000			
		Penyusunan Dokumen CALK								Jumlah Laporan CALK	1 laporan	1.000.000			
		Penyusunan Dokumen SAKIP								Jumlah Laporan SAKIP	1 laporan	1.000.000			
		Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi								Jumlah Laporan	1 laporan	1.000.000			
		Sinergitas Kecamatan								Jumlah Laporan	1 laporan	1.500.000			

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.260.531.412	3.179.658.665		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.260.531.412	3.152.849.665		
		Penyediaan Gaji ASN							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	1.347.716.000			
		Penyediaan Tunjangan ASN							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	912.815.412			
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Jumlah laporan keuangan bulanan	0	0	13.000.000		
		Dokumen Prognosis							Jumlah Dokumen	0	0			
		Dokumen Belanja Fungsional							Jumlah Dokumen	0	0			
		Dokumen Rekonsiliasi Aset							Jumlah Dokumen	0	0			
		Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi							Jumlah Dokumen	0	0			
		Berita Acara Cash Opname							Jumlah Dokumen	0	0			
		Berita Acara Opname Persediaan							Jumlah Dokumen	0	0			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi						100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	15.000.000	0		
		Bimtek Peningkatan ASN						100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	15.000.000	0		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						IP ASN Perangkat Daerah	100%	Jumlah penyediaan pakaian di-nas PNS ser-ta	0	0	13.000.000	

								Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		perleng-kapannya					
		Seragam Kedy							100%	Jumlah Pengadaan Kain Seragam	0	0	0		
		Korpri dan Celana							100%	Jumlah Pengadaan Kain Seragam	0	0	0		
	7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan				80.500.000	161.500.000		
	7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah jenis komponen ins talasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	7.500.000	8.500.000		
		Lampu, Kabel, Komponen Listrik Lainnya								Jumlah jenis komponen ins talasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	7.500.000	8.500.000		
	7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000	77.500.000		
		Laptop, Printer, AC, Komputer, CCTV, Mesin Fotocopy dll								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	20.000.000	77.500.000		
	7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Jumlah waktu penyediaan bahan logistic kantor	1 paket	30.000.000	32.000.000		
		Makanan dan Minuman Rapat								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	30.000.000	32.000.000		
	7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								Jmlh jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	5.000.000	5.500.000		

		Fotocopy, Cetak lembar SPPD, Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas, Cetak Kop Dinas							Jmlh jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	5.000.000	5.500.000		
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material							Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	10.000.000	11.000.000		
		ATK							Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	10.000.000	11.000.000		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.000.000	27.000.000		
		SPPD							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.000.000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	1 paket	10.000.000			
		Pengadaan Mebel							Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	0	0			
		Meja Rapat, kursi rapat, almari, kursi tamu, dll							Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	0	0			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									72.350.000	79.000.000		

	7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.350.000	50.000.000		
		Listrik kantor								Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	29.496.500			
		Air Kantor								Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	5.953.500			
		Kebutuhan Telepon dan Internet Kantor								Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	9.900.000			
	7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12 Laporan	27.000.000	29.000.000		
		Tenaga administrasi kantor (2 orang)								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000			
	7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%			59.000.000	57.917.080		
	7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan						Persentase	87%	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	26.500.000	27.000.000		

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan						penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	(1 mobil dan 1 motor)				
		Pajak								Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	1.525.000	1.800.000		
		BBM								Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	21.975.000	27.000.000		
		Service Kendaraan Dinas								Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit (1 mobil dan 1 motor)	3.000.000	8.500.000		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	25.000.000	20.617.080		
		Pemeliharaan Gedung								Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	18.750.000			

		Pemeliharaan Pendopo							Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	6.250.000			
	7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		7.500.000	8.500.000	

		Service Peralatan kantor, printer, laptop, AC, dll							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.500.000			
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	87%		25.000.000	50.000.000		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								500 pelayanan	25.000.000	50.000.000		

	7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha								Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0	0	20.000.000	
	7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	30 laporan	25.000.000	30.000.000	
		Sosialisasi Bidang Pelayanan, Monev, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	87%		1 Laporan Hasil Sosialisasi Bidang Pelayanan, 5 Laporan Hasil Monev, 12 Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Bidang Pelayanan, 12 Laporan Bidang Pelayanan	10.000.000		
		SKM (Mendukung program bupati pada misi 3)									1 Laporan	5.500.000		

		Sosialisasi Bidang Pelayanan								1 Laporan	2.000.000			
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan								12 Laporan	5.000.000			
		Evaluasi Pelayanan								12 Laporan	2.500.000			
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									196.517.000	380.000.000		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	17.500.000	60.000.000		
		Asistensi Penyusunan LPJ							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
		Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			

		Asistensi Penatausahaan Desa							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
		Asistensi Perubahan APBDes							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
		Asistensi Penyusunan APBDes							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
		Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	15 laporan (Jumlah desa)	2.187.500			
	7.01.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	17.000.000	75.000.000		
		Musrenbang							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	8.000.000			
		Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000			
		Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000			

		Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000			
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.250.000			
	7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%			Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	45.000.000	80.000.000		

		Honorarium Tim Forkopimca							Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	10.200.000			
		Apel Linmas							Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	9.000.000			
		Pemantauan dan Pengamanan Wilayah							Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	9.000.000			
		Tanggap Bencana							Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	7.800.000			
		Penertiban dan Penegakan Perda							Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	9.000.000			
	7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	5 dokumen	117.017.000	165.000.000		
		Koordinasi dan Konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat	1 Dokumen	6.000.000			
		Hibah Sapi							Jumlah dokumen	1 Dokumen	35.000.000			

		Pemberdayaan Masyarakat (Salah satunya mendukung KLA ; mendukung program prioritas Bupati (ODF))								Jumlah dokumen	1 Dokumen	67.017.000			
		Pencegahan dan Penanganan Wabah								Jumlah dokumen	1 Dokumen	3.000.000			
		Fasilitas Bantuan Sosial								Jumlah dokumen	1 Dokumen	6.000.000			

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sooko Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Sooko. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sooko di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sooko berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.
- b. Kecamatan Sooko berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sooko Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sooko Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sooko Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sooko selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sooko Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Sooko juga memberi umpan balik (fed back) dalam pengambilan keputusan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rankir Renja Kecamatan Sooko ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan serta memberikan manfaat bagi proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2022

 CAMAT SOOKO
MASLUCHMAN, SH, MSI
Pembina Tk.I
NIP. 19691119 199803 1 005